

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN:

**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya**

SEKRETARIAT

APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas gedung kantor merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung kantor harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga pemeliharaan/perawatan yang mempunyai kemampuan yang cukup trampil dalam bidang jasa kebersihan gedung kantor.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kebersihan pemeliharaan/perawatan bangunan dan halaman gedung kantor khususnya Kondisi Toilet yang nyaman dan Bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau membuat kegiatan pemeliharaan Gedung kantor pada tahun anggaran 2025 guna menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap kebersihan dan keindahan dalam pekerjaan pemeliharaan gedung kantor.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan kenyamanan, keindahan dan kebersihan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilaksanakannya Pekerjaan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri, Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ini sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dari sisi **kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu** pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.

2. Tujuan Pekerjaan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri, Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan dilaksanakan secara **tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.**

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

Sasaran dari kegiatan ini adalah mencakup kebersihan lantai, jendela, langit-langit selasar, ruang kerja tambahan serta peralatan kantor yang menunjang kegiatan antara lain : Toilet Laki-Laki dan pekerjaan lainnya di gedung kantor yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

D. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilaksanakan di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Gedung B 2 Lt. 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang yang akan berlangsung lebih kurang selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender yang dalam kegiatannya melibatkan seluruh pelaksana kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

E. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana yang diperlukan untuk mengadakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan dibebankan pada DIPA APBD Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Tahun Anggaran 2025.

F. PERSYARATAN PENYEDIA

o KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS

- Izin usaha di bidang jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak **2023**;
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- Menyampaikan Pakta Integritas;
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

2. Jumlah Tenaga Yang Diperlukan

Jumlah tenaga yang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi / Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Jumlah Orang	Pengalaman Tahun
1.	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Min. Ijazah SMA/SMK Pekerjaan Gedung	1	-

3. Peralatan Utama Yang Diperlukan

Memiliki kemampuan *menyediakan* peralatan terutama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu.

No.	Jenis Alat	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Peralatan Tukang	Set	1	Menyesuaikan Sewa/ Milik Sendiri

Keterangan:

Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan dapat dilihat pada BILL OF QUANTITY (BOQ) pada Mobilisasi.

G. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama **ALUDIN ANDI, SE., MM**

NIP **19800211 200604 1 006**

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025.

Organisasi **Perangkat Daerah (OPD):**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

B. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

Waktu Penyelesaian Pekerjaan Sampai Dengan Penyerahan Barang / Jasa Waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan

I. IDENTIFIKASI BIAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Untuk identifikasi bahaya Pekerjaan ini merupakan identifikasi bahaya Resiko KECIL

No.	Posisi / Jabatan	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pemasangan Plafon Toilet	Kecelakaan saat naik Andang ketika Pemasangan Plafon Toilet

J. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

K. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan Renovasi Toilet Laki-Laki meliputi:

- Pekerjaan Pendahuluan
- Pekerjaan Plafond
- Pekerjaan Lantai
- Pekerjaan Sanitair
- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan Akhir

L. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

Total Biaya yang diperlukan untuk Sub kegiatan ini berdasarkan dokumen anggaran adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

N. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung (Renovasi Toilet) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tanjungpinang, 7 Maret 2025

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ALUDIN ANDI, SE., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800211 200604 1 006